



Analisis Situasi Demokrasi di Indonesia Pemilu 2024: Pemilih Pemula Lingkungan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

¹Artikasari, ²Irene Cahyani Sinaga, ³Muhammad Ahza Arroyan, ⁴Angelila Dzakwan Pratiwi, ⁵Calvin Philip Andrew, ⁶Shaquille Rashaan Putra Adam, ⁷Satino

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: 4 September 2024
Revised: 11 September 2024
Accepted: 30 September 2024

Democracy is a political system where power is held by the people, either directly or through freely and fairly elected representatives. However, in Indonesia, the 2024 elections face a number of issues that could threaten the integrity of the democratic system. One of the main issues is the concern of violations and manipulations in the electoral process. This can undermine public confidence in the legitimacy of election results and destabilize politics. Not only that, the influence of money and certain political forces can influence election results, overriding the true voice of the people. In response to this, we intend to conduct research with the aim of describing the situation of democracy after the 2024 elections and analyzing the dominance of the presidential election with the hope that our research can increase the value of democracy in Indonesia and become a literature study in the future. The research method we use is qualitative research using a questionnaire which is carried out by giving a set of questions or written statements to respondents to be answered to find out how the views of the academic community are related to the post-2024 election democratic situation in Indonesia. In addition, we will conduct a dialog with several UPN "Veteran" Jakarta academicians which will then be published via Youtube. The results of the research from the data obtained, we see that there are still many controversial issues that are of concern, especially the dominance of presidential elections compared to legislative elections.

Keywords: Democracy, Election, Politics

(*) Corresponding Author:

12310611308@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310611104@mahasiswa.upnvj.ac.id; 32310611427@mahasiswa.upnvj.ac.id; 42310611396@mahasiswa.upnvj.ac.id; 52310611400@mahasiswa.upnvj.ac.id; 62310611385@mahasiswa.upnvj.ac.id; 7satino@upnvj.ac.id

How to Cite: Artikasari, A., Sinaga, I., Arroyan, M., Pratiwi, A., Andrew, C., Adam, S., & Satino, S. (2025). Analisis Situasi Demokrasi di Indonesia Pemilu 2024: Pemilih Pemula Lingkungan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 8-17. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9346>

PENDAHULUAN

Pemilu 2024 di Indonesia menandai sebuah momentum penting dalam perjalanan demokrasi negara ini. Namun, dibalik keramaian dan antusiasme yang menyertainya, terdapat fenomena yang mengindikasikan ketidakseimbangan dalam perhatian publik terhadap pemilihan anggota DPR dibandingkan dengan Pilpres. Sebagai bagian dari proses demokrasi, pemilihan anggota DPR seharusnya sama pentingnya dengan Pilpres karena anggota DPR memiliki peran krusial dalam menyuarakan kepentingan rakyat di tingkat legislatif. Namun, kenyataannya, pemilih pemula, yang mungkin baru pertama kali terlibat dalam proses pemilihan umum, cenderung lebih tertarik pada Pilpres. Dampak dari ketidakseimbangan ini adalah potensi terjadinya representasi politik yang tidak merata, di mana anggota DPR yang terpilih mungkin tidak benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat.

Saat ini, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Meskipun telah mengalami perkembangan positif sejak reformasi pada tahun 1998, tetapi masih terdapat beberapa isu yang mempengaruhi kualitas demokrasi di negara tersebut. Isu utama yang terus menjadi perhatian adalah adanya kekhawatiran terkait pelanggaran dan manipulasi dalam proses pemilihan umum. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas hasil pemilu. Selain itu, masih terdapat tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, serta ketidaksetaraan akses terhadap partisipasi politik. Sama halnya di tahun 2019, Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini memiliki kecenderungan bahwasanya Pemilihan Legislatif (Pileg) dianggap seolah-olah tidak penting bila dibandingkan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Salah seorang Anggota Komisi II DPR RI yaitu Firman Soebagyo memberikan pandangannya terkait kurangnya kesadaran akan esensi Pemilihan Legislatif. Menurutnya, Pemilihan Legislatif merupakan hal yang penting karena legislatif lah yang mewakili suara rakyat serta membuat regulasi yang nantinya akan menjadi dasar aturan hukum.

Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan diberikan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan adil. Namun, di Indonesia, pemilu 2024 menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam integritas demokrasi. Isu utama termasuk pelanggaran dan manipulasi dalam proses pemilihan umum, transparansi dan akuntabilitas yang kurang, serta ketidaksetaraan akses terhadap partisipasi politik. Pengaruh uang dan kekuatan politik tertentu juga bisa mengesampingkan kepentingan rakyat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu serta mendorong partisipasi politik yang inklusif. Solusi yang diajukan mencakup pendidikan politik, kampanye informasi, serta dialog dengan sivitas akademika UPN "Veteran" Jakarta yang akan dipublikasikan melalui Youtube untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat 2 hal yang menjadi rumusan masalah kami, yaitu:

1. Bagaimana situasi demokrasi di Indonesia pemilu 2024?
2. Mengapa pemilihan presiden lebih mendominasi dibandingkan pemilihan legislatif?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis situasi demokrasi di Indonesia setelah Pemilu 2024 serta memahami mengapa pemilihan presiden cenderung mendominasi dibandingkan dengan pemilihan legislatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Ni'matul Huda (2010); terdapat 2 (dua) fakta historis tentang sejarah teori demokrasi. Pertama, hampir semua orang saat ini mengaku sebagai pendukung demokrasi. Berbagai macam rezim politik di dunia menggambarkan diri mereka sebagai demokrasi. Namun pada kenyataannya, apa yang mereka katakan dan lakukan oleh satu rezim dengan rezim lainnya seringkali berbanding terbalik. Kedua, meskipun banyak negara saat ini menganut prinsip demokrasi, sejarah lembaga politik mereka menunjukkan adanya kerapuhan dan kerentanan dalam sistem demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 dengan jelas menggambarkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk dicapai dan dipertahankan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi Waktu dibagi dalam empat periode, yaitu:

1. Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959

Pada periode 1945-1959 atau awal kemerdekaan Indonesia sistem demokrasi di Indonesia disebut Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 yang menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta Menteri-Menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Adanya fragmentasi partai mengakibatkan setiap kabinet didasarkan pada batasan masa jabatan yang berpusat pada satu atau dua partai besar dan sebagian partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.

2. Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965

Sistem politik era demokrasi terpimpin sangat terkenal dengan ciri kekuasaan presidensial. Pada masa itu, kekuasaan presiden sangat kuat, sebaliknya peran partai politik semakin terbatas, pengaruh komunis semakin meningkat, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meningkat. Ada banyak distorsi praktik demokrasi dalam praktik pemerintahan selama periode ini. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi dalam sidang konstituante, yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari praktik demokrasi.

3. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30S PKI. Dasar hukum yang digunakan pada masa demokrasi pancasila (1965-1998) adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari munculnya era ini adalah keinginan untuk memulihkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.

4. Demokrasi Periode Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan berakhirnya masa jabatan Soeharto sebagai presiden setelah sekitar 32 tahun berkuasa. Demokrasi Indonesia pada periode reformasi ini membangun dasar yang kokoh bagi pelaksanaan demokrasi di masa yang akan datang (Purnamawati, E., 2020).

Adapun dasar hukum pemilu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menjadi pijakan utama yang menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait dengan pelaksanaan pemilu. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memegang peranan penting dalam menetapkan aturan teknis pelaksanaan pemilihan, seperti persyaratan pencalonan dan tata cara pemungutan suara. Selain itu, regulasi-regulasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum dan memastikan integritas proses pemilu. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan pemilihan umum di Indonesia dapat diselenggarakan secara adil, transparan, dan demokratis, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan angket yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab untuk mengetahui bagaimana pandangan sivitas akademika terkait situasi demokrasi pemilu 2024 di Indonesia. Menurut Sugiyono (2017:142) Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis pertanyaan dalam angket terbagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka mengharapkan opini dari responden, sehingga jawaban yang diberikan berupa uraian tentang sesuatu. Sebaliknya, pertanyaan tertutup mengharapkan jawaban singkat di mana responden memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia, seperti setuju atau tidak setuju. Selain itu, kami melakukan wawancara atau dialog kepada beberapa sivitas akademika Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta serta studi literatur penelitian-penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuesioner (angket) maupun observasi (pengamatan).

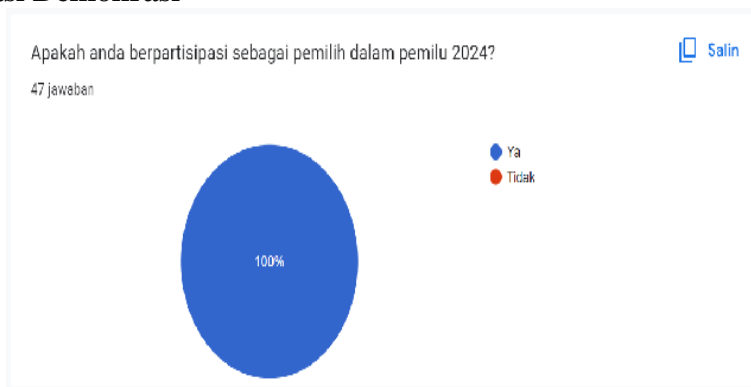
Menurut Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Moleong (2012:4), metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu-individu atau perilaku yang dapat diamati. Kami menggunakan pendekatan ini karena data yang akan kami jelaskan berupa pendapat, pandangan, komentar, kritik, alasan, dan sejenisnya. Berdasarkan lokasinya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan permasalahannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian ini mencoba memperoleh gambaran tentang situasi demokrasi pemilu 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi demokrasi pemilu 2024 serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya dominasi Pilpres dibandingkan Pileg di Indonesia. Berdasarkan data yang terkumpul, ditemukan beberapa gambaran situasi serta alasan adanya dominasi Pilpres dibandingkan Pileg.

Analisis Situasi Demokrasi

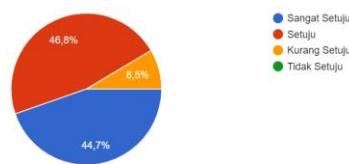
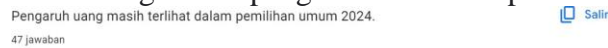


Gambar 1. Partisipasi mahasiswa/i dalam Pemilu Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa/i Fakultas HukumUPN "Veteran Jakarta telah berpartisipasi dalam Pemilu 2024.



Gambar 2. Pengaruh hasil Pemilu terhadap dinamika politik

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa 51,1% menjawab di rentang 5 serta 36,2% menjawab di rentang 4. Keterangan : 5 menunjukkan bahwa partisipan setuju hasil Pemilu 2024 sangat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia.



Gambar 3. Pengaruh uang Pemilu 2024 Berdasarkan data tersebut maka 44,7% mahasiswa/i Fakultas Hukum UPN “Veteran Jakarta sangat setuju dan 46,8% setuju bahwa pengaruh uang masih terlihat dalam Pemilu 2024.



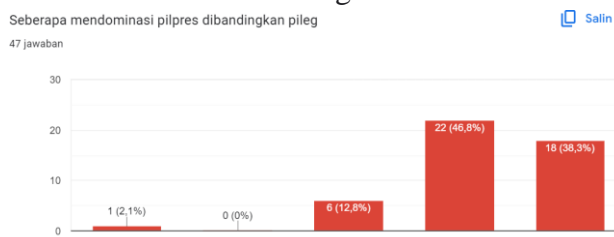
Gambar 4. Isu Pemilu 2024

Berdasarkan data kuesioner kami merangkum jawaban dari partisipan dan melihat bahwa pemilu 2024 di Indonesia diwarnai oleh berbagai isu penting, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres, keterlibatan presiden aktif dalam kampanye, praktik politik uang, dan nepotisme. Selain itu, politisasi bansos, validitas aplikasi sirekap, tuduhan kecurangan pemilu, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, dan pelanggaran HAM turut mempengaruhi proses pemilu. Kontroversi calon wapres, isu netralitas lembaga negara, polemik dalam kampanye, dan kontroversi real count pemilu juga menjadi perhatian utama. Semua isu ini mencerminkan tantangan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dominasi Pilpres Dibandingkan Pileg



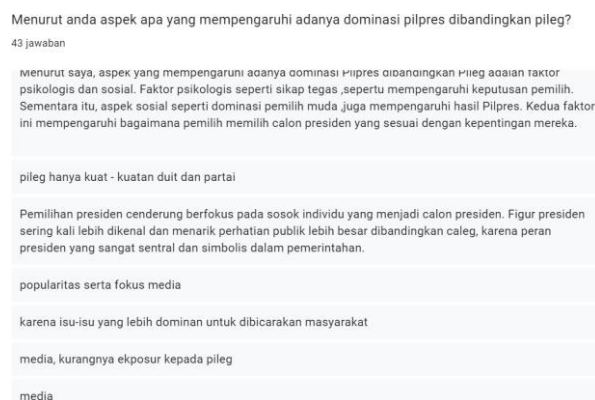
Gambar 5. Dominasi Pilpres dibandingkan Pileg Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa mayoritas bahkan seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum UPN “Veteran Jakarta” sangat setuju/setuju bahwa Pilpres lebih mendominasi dibandingkan Pileg.



Gambar 6. Ukuran dominasi Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat 38,3% direntang 5 serta 46,8% direntang 4 mahasiswa/i Fakultas Hukum UPN “Veteran Jakarta” merasa bahwa Pilpres lebih mendominasi.



Gambar 7. Dominasi Pilpres mempengaruhi stabilitas politik Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa 17% mahasiswa/i Fakultas Hukum UPN “Veteran Jakarta” sangat setuju dan 66,1% setuju serta 14,9% lainnya kurang setuju.



Gambar 8. Faktor dominasi Pilpres Berdasarkan data kuesioner kami merangkum jawaban dari partisipan dan melihat bahwa adanya dominasi pilpres dibandingkan pemilu dikarenakan beberapa alasan utama. Pertama, sistem presidensial membuat presiden sebagai pemimpin eksekutif sangat berpengaruh dan simbolis, memicu perhatian lebih besar. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem legislative juga mengurangi minat terhadap Pileg.

Kampanye capres/cawapres yang besar-besaran dan dominasi perbincangan di media sosial lebih menarik perhatian masyarakat dibandingkan kampanye Pileg.

Pemilihan 2024 yang didominasi Gen Z kurang mengenali calon legislatif, dan pilihan yang terbatas dalam Pileg dibandingkan Pilpres juga menjadi faktor. Selain itu, Pilpres langsung memilih pemimpin negara yang dianggap lebih penting daripada perwakilan legislatif. Aspek dana kampanye yang lebih besar, cakupan yang luas, serta keterlibatan tokoh populer turut menambah perhatian terhadap Pilpres. Media dan liputan publik, branding yang kuat, serta faktor psikologis dan sosial juga berperan dalam mendominasi Pilpres di mata publik dibandingkan Pileg.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pandangan sivitas akademika terkait situasi demokrasi pada Pemilu 2024 di Indonesia. Melalui penggunaan angket dan wawancara, kami berhasil mengumpulkan data yang mewakili berbagai sudut pandang dan pemahaman terhadap fenomena politik yang diamati. Metode ini memungkinkan kami untuk memperoleh data deskriptif berupa pendapat, pandangan, dan komentar yang membantu kami dalam menganalisis situasi politik yang kompleks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa/i Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Selain itu, sebagian besar responden percaya bahwa hasil Pemilu memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia, dengan sebagian besar setuju bahwa uang masih memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pemilihan. Temuan lainnya menyoroti berbagai isu penting yang mempengaruhi pemilu, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi, praktik politik uang, dan konflik kepentingan yang berpotensi merusak integritas demokrasi.

Situasi demokrasi di Indonesia selama pemilu 2024 menggambarkan lanskap politik yang dinamis dan kompleks. Sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, Indonesia telah melakukan serangkaian pemilihan umum yang dianggap sebagai tonggak penting dalam proses demokratisasinya. Namun, pemilu 2024 memberikan sorotan khusus terhadap berbagai tantangan dan potensi yang muncul dalam konteks demokrasi Indonesia.

Pertama, partisipasi politik menjadi fokus utama dalam menganalisis situasi demokrasi. Pemilu 2024 mencatat tingkat partisipasi yang beragam dari berbagai segmen masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan minat yang besar dalam proses demokrasi, tetapi juga menyoroti tantangan dalam memastikan partisipasi yang inklusif dan merata dari seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, pengaruh hasil pemilu terhadap dinamika politik menjadi perhatian utama. Hasil pemilu yang dianggap kontroversial atau dipertanyakan dapat memicu ketegangan politik dan sosial yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hasil pemilu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi pemerintah dan kepercayaan mereka terhadap institusi demokratis.

Selain itu, peran uang dalam pemilihan umum juga menjadi faktor penting dalam menentukan situasi demokrasi. Praktik politik uang yang meluas dapat merusak integritas pemilihan dan mempengaruhi hasilnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana pengaruh uang dalam proses pemilihan umum dan upaya apa

yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Bahkan isu-isu kritis yang muncul selama pemilu 2024 juga memberikan gambaran tentang situasi demokrasi. Dari kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi hingga tuduhan kecurangan pemilu, berbagai isu ini mencerminkan tantangan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Menimbang partisipasi masyarakat pada saat pemilu 2019 tercermin dalam keterlibatan emosional yang kuat dan polarisasi politik, Secara umum, keduanya mencerminkan kompleksitas politik dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas demokrasi. Sebagian besar pemilih cenderung terlibat secara emosional dalam pemilihan, terutama karena pemilihan ini melibatkan pemilihan presiden yang penting. Kampanye yang intensif dan berbagai janji oleh kandidat presiden serta partai politiknya dapat mempengaruhi pemilih, baik secara positif maupun negatif. Selain itu, isu-isu sensitif, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, juga memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilih.

Peran media massa juga signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Melalui liputan berita, debat politik, dan iklan kampanye, media massa memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi dan narasi politik kepada pemilih. Namun, keberadaan hoaks dan informasi yang menyesatkan juga dapat membingungkan pemilih, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan mereka di tempat pemungutan suara. Selain itu, aspek sosial dan budaya juga turut mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor seperti latar belakang ekonomi, pendidikan, agama, dan wilayah geografis dapat memainkan peran dalam menentukan preferensi pemilih. Misalnya, pemilih di daerah perkotaan mungkin memiliki kekhawatiran dan preferensi yang berbeda dibandingkan dengan pemilih di daerah pedesaan, tergantung pada masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari.

Adapun peluang dan tantangan dari pemilu serentak 2019 melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satu peluangnya adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya pemilihan serentak, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dengan memberikan suara mereka untuk berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari presiden hingga tingkat lokal.

Meskipun demikian, pemilu 2024 memberikan sorotan khusus terhadap berbagai tantangan dan potensi yang muncul dalam konteks demokrasi Indonesia. Dari kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi hingga tuduhan kecurangan pemilu, berbagai isu ini mencerminkan tantangan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa lanskap politik pada pemilu 2024 lebih dinamis dan beragam, dengan tantangan yang lebih kompleks, membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperkuat demokrasi dan memastikan nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan diperkuat di masa mendatang. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika demokrasi selama periode tersebut, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan diperkuat di masa mendatang.

Dominasi Pilpres dibandingkan Pileg juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Mayoritas responden sepakat bahwa Pilpres lebih mendominasi dibandingkan Pileg, dengan sebagian besar merasa bahwa dominasi ini mempengaruhi stabilitas politik negara. Penjelasan atas dominasi ini mencakup faktor-faktor seperti peran simbolis

presiden, kurangnya kesadaran terhadap sistem legislatif, serta intensitas kampanye dan perbincangan di media sosial yang lebih besar terkait Pilpres.

Analisis dominasi Pilpres dibandingkan Pileg dilakukan melalui teori sistem politik, yang mempertimbangkan struktur politik Indonesia yang didasarkan pada sistem presidensial. Faktor-faktor seperti peran simbolis presiden, intensitas kampanye, dan pengaruh media menjadi penjelasan atas dominasi ini. Dengan mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori-teori politik yang relevan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika politik di Indonesia pasca-Pemilu 2024. Ini memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan potensi solusi dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

PENUTUP

Penutup penelitian ini menyoroti kompleksitas politik yang mewarnai pemilu 2024 di Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi, masalah seperti politik uang, konflik kepentingan, dan kontroversi hasil pemilu menjadi sorotan utama yang perlu diperhatikan. Dominasi Pilpres terhadap Pileg menegaskan pentingnya simbolis presiden dan intensitas kampanye dalam membentuk persepsi publik, namun perlunya menjaga kesetaraan antara Pilpres dan Pileg untuk memastikan representasi yang proporsional di tingkat legislatif.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, dengan penegakan hukum yang ketat dan penerapan teknologi untuk pemantauan publik. Selain itu, upaya untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dari berbagai lapisan masyarakat perlu dilakukan melalui pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat sipil. Kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan menghadapi tantangan di masa mendatang dengan lebih baik.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara demokratis yang berkembang dengan baik, menjaga nilai-nilai demokrasi yang kokoh, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

REFERENSI

- Apter, D. (1990). *The Politics of Modernization*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku pemilih menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40-48.
- Hilmy, M. (2014). *Menyelamatkan demokrasi*.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Huda, N. (2010). *Ilmu negara*.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- RRI. (2024). *Dinamika Pilpres Lebih Dinamis Dibanding Pileg*. Diakses dari <https://www.rri.co.id/pemilu/562275/dinamika-pilpres-lebih-dinamis-dibanding-pileg>
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.

Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646-9653.